

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara hukum yang merupakan sebutan untuk Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, negara yang mengutamakan hak serta warga negaranya. Wilayah Indonesia yang terbilang luas membuat negara ini menggunakan sistem otonomi daerah dimana daerah otonom memiliki hak, wewenang dan juga kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya. Sama halnya seperti kepentingan masyarakat yang diatur oleh pemerintah daerahnya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Pemerintah daerah pada saat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan sesuai dengan kelebihan serta potensi daerahnya masing-masing diperlukan sistem otonomi daerah yang akan memberikan ruang dalam berwenang. Adapun kewajiban warga negara Indonesia ialah membayar pajak dan retribusi dalam peran pembiayaan daerah maupun negara dan membantu mengembangkan daerahnya. Peran masyarakat disini sangat penting yang berujung dalam pembangunan dan pengembangan negara

Dalam wujud realisasi pembangunan, perlu diperhatikan masalah pembiayaan dan pembangunan negara yaitu melalui sumber dana yang asalnya dari dalam negeri seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud salah satunya yaitu retribusi daerah. Pemerintah daerah akan melakukan pengelolaan sumber daya daerahnya dan akan bertanggung jawab atas pengelolaan yang dilakukan kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam mengurangi potensi kesenjangan sosial. Pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah harus transparan dan terbuka dengan menerapkan prinsip pelayanan untuk kepuasan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa sistem otonomi daerah juga memiliki kekurangan seperti pada masa orde baru yaitu ketergantungan fiskal,

bantuan pemerintah pusat, dan subsidi yang menunjukkan tidak adanya perkembangan pada Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan mengenai pendapatan daerah seperti pajak yang sudah sangat jelas bahwa pajak diartikan sebagai iuran wajib, dimana setiap warga negara harus membayar pajak berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan seperti pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak bumi bangunan. Tidak hanya pajak daerah, ada retribusi daerah yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang jumlahnya cukup besar setelah pendapatan pajak

Retribusi yang jumlahnya cukup besar juga menjadi sumber pendapatan ataupun penerimaan yang sudah sejak lama diterapkan oleh pemerintah, terlebih pada pemerintah daerah yang menempatkan retribusi daerah di nomor dua setelah pajak daerah. Dapat dikatakan bahwa jumlah pendapatan retribusi pemerintah daerah cukup stabil namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah pendapatan retribusi mengalami penurunan diakibatkan beberapa perubahan kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa masyarakat selalu *update* mengenai peraturan atau kebijakan baru yang diterapkan pemerintah agar tidak terjadi perubahan pada pendapatan yang signifikan.

Retribusi daerah dikelola oleh masing-masing daerah untuk keperluan pembangunan dan pengembangan daerah. Retribusi disini sebagai salah satu penerimaan atau pendapatan yang cukup berpotensi karena jumlahnya yang stabil retribusi juga menunjukkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan daerah. Pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdapat jumlah yang cukup besar untuk pendapatan retribusi daerah. Retribusi di sini dapat didefinisikan sebagai pelayanan langsung pemerintah daerah yang nanti akan digunakan kembali untuk pembiayaan ataupun pembangunan fasilitas daerah.

Retribusi daerah diperoleh pemerintah atas jasa yang sudah diberikan pemerintah, dimana masyarakat yang menikmati atau menggunakan jasa tersebut harus membayar retribusisesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Retribusi biasanya diperoleh atas jasa umum, jasa usaha dan izin tertentu. Untuk jasa umum biasanya diperoleh dari pelayanan kesehatan, kebersihan,

pelayanan pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan jasa usaha diperoleh atas pemanfaatan kekayaan daerah seperti tempat rekreasi milik daerah, terminal, penginapan, pertokoan dan lain lain. Dan yang terakhir adalah retribusi atas izin tertentu yang diberikan pemerintah seperti izin mendirikan bangunan dan izin trayek. Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa retribusi itu sama dengan pajak, namun pada pengelompokannya retribusi berbeda dengan pajak. Retribusi dikelompokkan sebagai pendapatan non-perpajakan, walaupun pajak dan retribusi masuk ke dalam pendapatan asli daerah namun keduanya merupakan kelompok pendapatan yang berbeda.

Keadaan kota Depok yang semakin berkembang hari demi hari menjadi salah satu bentuk perubahan yang nyata bahwa Pendapatan Asli Daerah kota Depok mengalami kemajuan walaupun pada Laporan Keuangan yang disajikan retribusi daerah tidak selalu mengalami kenaikan pada realisasinya. Dalam hal ini, judul yang dipilih ialah “Tinjauan atas Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok” sebagai bentuk ketertarikan untuk membahas mengenai satu akun dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan retribusi.

I.2. Tujuan

Tujuan dibuatnya Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan penjabaran topik yang dipilih berkaitan dengan mata kuliah yang dipelajari selama masa perkuliahan. Topik yang dipilih yaitu Tinjauan atas Pengakuan Pendapatan Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang didalamnya akan dijabarkan:

1. Penerapan Pernyataan SAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Pernyataan SAP 12 mengenai Laporan Operasional.
2. Pengakuan pendapatan retribusi pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
3. Identifikasi pendapatan retribusi dimulai dari pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

I.3. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh ialah memberikan pengetahuan mengenai pengakuan pendapatan retribusi, pencatatannya, sampai kepada penyajian dan pelaporan pendapatan retribusi pada Laporan Realisasi Anggaran. Dikarenakan ada sedikit perbedaan basis akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan laporan lainnya seperti Laporan Operasional, yaitu Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas berdasarkan Pernyataan SAP 02. Sehingga manfaat dari Laporan Tugas Akhir ini ialah dapat menambah ilmu dan pengetahuan pembaca tentang pendapatan retribusi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintahan

Pemerintah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Depok mendapatkan manfaat dalam melaksanakan pekerjaannya yang terbantu oleh mahasiswa/i Praktik Kerja Lapangan dan juga dapat memberi informasi mengenai pendapatan retribusi yang merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu manfaat yang diperoleh ialah dapat memberikan saran yang baik bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok terhadap retribusi daerah sebagai perbaikan kinerja pemerintah.

2. Bagi Penulis

Penulis memiliki pengetahuan baru mengenai suasana dan cara bekerja di lembaga pemerintah, mendapat pengalaman baru mengenai pendapatan yang diterima pemerintah, serta menjadi sarana penulis untuk dapat belajar secara langsung dan membandingkan dengan teori selama masa perkuliahan pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

3. Bagi Universitas

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat untuk Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai tambahan pembelajaran dalam perkuliahan ataupun referensi dalam penulisan karya tulis.